

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1. Konsep dan Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata “daya”, daya memiliki arti sebagai suatu kemampuan maupun mampu untuk melakukan sesuatu. Yang berarti, pemberdayaan merupakan suatu proses ataupun cara untuk memberdayakan (KBBI, n.d.) . Sejalan dengan departemen pendidikan nasional (DEPDIKNAS) (dalam Suhu et al., 2020, hlm.3) pemberdayaan merupakan suatu proses maupun upaya dalam tindakan untuk berdaya agar mampu melakukan sesuatu berupa akal dan ikhtiar. Adapun menurut Merian (dalam Maryani & E Nainggolan, 2019, hlm.1) Pemberdayaan merupakan sebagai upaya untuk memberi berbagai kemampuan sehingga cakap untuk dapat melakukan sesuatu dan juga dapat memberikan kekuasaan maupun kewenangan. Dengan demikian, dari berbagai pengertian pemberdayaan diatas, pemberdayaan merupakan suatu proses individu maupun kelompok agar dapat memiliki kemampuan ataupun daya untuk melakukan sesuatu kearah yang lebih positif lagi untuk hidupnya

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumardjo (dalam Endah, 2020, hlm.3) merupakan sebagai proses pengembangan motivasi, kemampuan, kesempatan masyarakat pada sumber daya yang ada, sehingga dapat memiliki ruang yang lebih baik untuk masa depannya dan dapat berpartisipasi pada kehidupannya sendiri ataupun komunitasnya sehingga dapat terwujudnya kualitas yang lebih baik untuk kehidupannya. Adapun pada konsepnya suatu pemberdayaan masyarakat harus mampu menciptakan suatu situasi dimana masyarakat yang diberdayakan harus mampu membantu dirinya sendiri, dalam hal ini memiliki makna bahwa sebagai berikut : (1) Fasilitator baik penyuluh harus dapat bekerjasama dengan masyarakat yang diberdayakan, hal ini mengandung makna bahwa seorang fasilitator tidak boleh bersikap menggurui dan juga bukan sebagai penentu tetapi harus mampu

menciptakan dialogis dengan masyarakat agar dapat menumbuhkan, terciptanya pergerakan dan memelihara partisipasi dari masyarakatnya sendiri. (2) Proses pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan secara dini maupun berkepanjangan, dalam hal ini masyarakat yang sedang diberdayakan harus dibina agar mampu memiliki kemandirian dalam mencapai tujuan dan keinginan masyarakat itu sendiri sehingga tidak terjadinya ketergantungan yang dapat membuat masyarakat tersebut tidak berdaya. (3) Proses pemberdayaan yang dilakukan pun harus mengacu pada terciptanya kesejahteraan ekonomi, karena dalam hal ini merupakan suatu kunci utama agar masyarakat dapat terjadi peningkatan dalam harkatnya sebagai manusia, Adicondro (dalam Mardikanto & Soebiato, 2020, hlm.101).

Sejalan dengan menurut Anthony Bebbington (dalam Rakhmadian & Arif, 2023, hlm.6) bahwasanya pada konsep pemberdayaan masyarakat terdapat upaya sebagai berikut; (1) *Enabling/* pengembangan, dalam upaya ini mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensinya sendiri. (2) *Empowering /* pemberdayaan, dalam hal ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas yang dimiliki masyarakat melalui berbagai langkah konkret, seperti penyediaan sumber daya dan pembukaan akses terhadap peluang yang akan meningkatkan kemandirian masyarakat. (3) Menciptakan kemandirian, dimana pada hal ini bahwasanya tidak ada masyarakat yang sepenuhnya tanpa potensi apapun. Dalam hal ini, setiap masyarakat tentunya memiliki berbagai kekuatannya tersendiri meskipun masyarakat tersebut tidak menyadarinya secara langsung, maka dalam hal tersebut perlu untuk digali dan juga dikembangkan.

Dengan demikian, pada hakikatnya suatu konsep pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan akan kemampuan serta kekuatan pada tiap individu maupun kelompok agar dapat berdaya dan melakukan sesuatu secara mandiri untuk kehidupannya yang lebih baik. Dalam hal ini melibatkan kolaborasi antara fasilitator dengan masyarakat melalui pendekatan dialogis dan tidak menggurui. Selain daripada itu, pemberdayaan harus dilakukan tanpa menciptakan ketergantungan, sehingga dalam

hal ini masyarakat yang diberdayakan mampu memncapi berbagai tujuan dan kaingin dalam hidupnya secara mandiri. Pemberdayaan juga diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berperan sebagai kunci utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat

2.1.1.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, sehingga dapat mempunyai peningkatan dalam hal kekuasaan, pengetahuan serta kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya baik dalam konteks sosial, ekonomi maupun dalam fisik. Sehingga, mampu mempunyai penghasilan, berpartisipasi dalam berabagai kegiatan sosial serta mandiri dalam menjalani berbagai tugas di kehidupannya (Suharto, 2014, hlm.59) . Sejalan dengan menurut Mardikanto (dalam Maryani & E.Nainggolan, 2019, hlm.8) terdapat 6 (enam) tujuan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut; (1) *Better Institution/* memperbaiki kelembagaan, dalam hal ini memiliki fokus bahwa pemberdayaan dengan memperbaiki kelembagaan dapat terciptanya suatu siklus yang lebih baik pada mengelola sumber daya. Dengan kelembagaan yang baik serta kuat akan senantiasa mendukung partisipasi aktif masyarakat dan berkontribusi pada keberlanjutannya suatu program permberdayaan. (2) *Better Business /* memperbaiki usaha, dalam hal ini masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan berbagai inovasi dalam usahanya, sehingga dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan dalam usahanya. Usaha yang lebih maju dan lebih baik akan menciptakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat setempat sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan dan sejahtera. (3) *Better Income/* memperbaiki pendapatan, dalam hal ini meningkatkanya suatu pendapatan berarti masyarakat akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. (4) *Better Environment/* memperbaiki lingkungan, dalam hal ini kerusakan lingkungan fisik dan sosial dipengaruhi oleh kemiskinan dan juga pendapatan yang terbatas, maka dengan memperbaiki lingkungan yang lebih baik akan memberikan sebuah manfaat yang memiliki jangka panjang bagi masyarakat itu sendiri. (5) *Better Living/* meperbaiki kehidupan, dalam hal ini memperbaiki kehidupan

mencakup juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan memberikan akses yang lebih baik seperti dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan juga berdaya. (6) *Better Community*/ memperbaiki masyarakat, dalam hal ini dengan memperbaiki masyarakat dalam suatu wilayah, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih kuat, harmonis, dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada baik yang terprediksi maupun tidak secara bersama-sama. Ini juga meliputi penguatan jaringan sosial, budaya, serta peningkatan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat di dalam suatu wilayah.

Dengan demikian secara keseluruhan program pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, sehingga mamampu untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri secara mandiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun fisik tanpa adanya ketergantungan kepada salah satu pihak tertentu. Semua tujuan yang sudah diuraikan saling mendukung dan berkaitan satu sama lain untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan dan lebih baik.

Adapun menurut Sulistiyani (dalam Wulandari et al., 2022, hlm.5) menyatakan bahwasanya suatu program pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil apabila ditandai dengan beberapa indicator sebagai berikut, (1) Jumlah penduduk miskin menurun, (2) Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui usaha yang sedang dilakukannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan ada di lingkungannya, (3) Kesejahteraan lingkungan dan keluarga meningkat ditandai dengan kepedulian masyarakatnya dalam artian rukun, (4) Meningkatnya kemandirian kelompok usaha dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dalam usaha kelompok maupun anggotanya seperti administrasi yang tertib dan juga meluasnya interaksi dengan kelompok lain maupun masyarakat, (5) Pemerataan pendapatan masyarakat miskin meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pokoknya.

Selain daripada itu, adapun menurut Suharto (dalam Suharto, 2014, hlm.63) menuturkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tak cukup hanya dilihat dari dan hanya satu sudut pandang saja, melainkan mencakup beragam aspek kehidupan,

yaitu terdapat kemampuan ekonomi, mengakses manfaat kesejahteraan hingga kemampuan kebiasaan dan berpolitis. Pada konsep tersebut tidak berhenti pada pengukuran kemampuan sederhana, tetapi dikaitkan pula dengan empat dimensi kekuasaan, (1) kekuasaan di dalam (*power within*), (2) kekuasaan untuk (*power to*), (3) kekuasaan atas (*power over*), (4) kekuasaan dengan (*power with*).

2.1.1.3. Tahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto (dalam Maryani & E.Nainggolan, 2019, hlm.13) terdapat 7 (tujuh) tahapan pada pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut;

- a. Persiapan, dalam tahap ini terdapat 2 hal yang harus dilakukan yaitu pertama, penyiapan petugas pemberdayaan masyarakat. Kedua, penyiapan lapangan yang dilakukan dengan pendekatan tidak langsung/ non-direktif.
- b. Pengkajian, pada tahap ini dilakukan secara individual melalui kelompok di dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam hal kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan sumberdaya yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang menjadi sasaran dalam suatu program.
- c. Perencanaan alternatif kegiatan atau program, dalam hal ini suatu petugas berperam sebagai agen perubahan/ *exchange agent* secara partisipatif berusaha untuk mencoba melibatkan masyarakat yang mejadi sasarannya untuk berfikir mengenai masalah yang mereka hadapi serta bagaimana cara mengetasinya. Dalam hal ini pula masyarakat diharapkan dapat memikirkan terkait berbagai alternative program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Perfomalisasi rencana aksi, dalam tahap ini *exchange agent* membantu masing-masing kelompok yang menjadi sasarannya untuk dapat merumuskan serta menentukan program dan berbagai kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta dirasakan juga. Selain dari hal itu, petugas membantu memberi berbagai gagasan ke dalam bentuk tulisan/ tertulis, terutama hal yang berkaitan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Implementasi kegiatan/program, dalam tahap ini agar seluruh peserta program dapat memahami secara jelas terkait dengan maksud, tujuan dan sasaran maka program harus terlebih dahulu disosialisaikan sehingga dapat mendukung untuk meminimalisir berbagai kendala. Dalam hal ini juga, peran masyarakat sebagai

kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan bersama. Kerjasama antarpetugas dan juga masyarakat sasaran merupakan suatu hal yang sangat penting agar tidak melencengnya suatu hal yang sudah direncanakan sebelumnya.

f. Evaluasi, dalam tahap ini evaluasi sebagai suatu proses pengawasan dari masyarakat sasaran dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sasaran tersebut diharapkan pada jangka waktu yang pendek membentuk suatu cara ataupun sistem untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjangnya dapat membangun komunikasi antar masyarakat sasaran yang lebih mandiri dengan dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada. Sehingga, dalam tahap evaluasi ini dapat mengukur seberapa besar keberhasilan program yang sedang dijalankan.

g. Terminasi, dalam tahap ini, merupakan sebagai tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan petugas maupun komunitas sasaran. Pada tahap ini juga diharapkan suatu sistem harus segera berhenti karena sudah diberdayakan dan mampu mengatur dirinya untuk menjalani hidup yang lebih baik agar tidak adanya suatu ketergantungan sehingga pada hakikatnya program yang diharapkan tidak berjalan dengan semestinya.

Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Tim Delivery (dalam Mardikanto & Soebiato 2020, hlm. 125), sebagai berikut;

a. Seleksi wilayah/ lokasi, seleksi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga serta pihak-pihak terkait (terlibat) dan juga masyarakat yang menjadi sasarannya. pada pemilihan lokasi ini hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, agar suatu tujuan pada pemberdayaan masyarakat tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan.

b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini sebagai upaya dalam mengkomunikasikan berbagai kegiatan untuk menciptakan dialog maupun diskusi dengan masyarakat sasaran, dengan sosialisasi ini akan membantu untuk menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak yang terkait (terlibat) mengenai program pemberdayaan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini juga, dapat

menentukan minat maupun ketertarikan masyarakat dalam berperan dan terlibat (partisipasi).

c. Proses partisipasi, pada tahap ini mencakup sebagai berikut;

1. Mengidentifikasi serta mengkaji potensi wilayah, dalam proses ini masyarakat mengidentifikasi berbagai potensi, permasalahan hingga peluang yang ada di wilayah maupun lingkungannya, sehingga dapat memahami kondisi yang mereka miliki. Dilakukan dengan meliputi; (1) Mempersiapkan masyarakat yang menjadi sasarannya dan juga pihak pemerintah setempat untuk mengadakan pertemuan awal dan mengatur teknis pelaksanaannya. (2) Persiapan penyelenggaraannya pertemuan. (3) Pelaksanaan kajian dan penilaian pada kondisi. (4) Pembahasan ataupun diskusi hasil kajian dan penyusunan rencana tindak lanjut.

2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, pada proses ini merujuk pada hasil identifikasi. Dilakukan dengan berbagai hal berikut; (1) Memprioritaskan serta menganalisis berbagai masalah yang ada dan terjadi. (2) Mengidentifikasi alternatif solusi terbaik. (3) Mengenali sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan masalah. (4) Mengembangkan rencana kegiatan dan juga mengorganisasikan pelaksanaannya.

3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok, dalam proses ini melaksanakan dari rencana yang telah disusun bersama dengan adanya dukungan dari pendamping. Rencana ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Proses ini juga melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan dan kemajuan kegiatan.

4. Memantau proses dan juga hasil kegiatan secara berkelanjutan (partisipasi, monitoring dan evaluasi), dalam hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan mendalam pada setiap tahapan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan.

d. Pemandirian masyarakat, dalam tahap ini melibatkan proses pendampingan untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu mengelola kegiatan tersebut secara mandiri. Pada tahap awal pemberdayaan, fasilitator berperan aktif, namun seiring waktu, keterlibatan mereka berkurang secara bertahap hingga masyarakat mampu melanjutkan kegiatan mereka secara mandiri. Waktu penarikan fasilitator ini ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dengan masyarakat.

Dengan demikian, tahapan dan proses pada suatu program pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan langkah terstruktur yang melibatkan persiapan, pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Setiap tahap dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengenali potensi, masalah, serta solusi yang mereka miliki dan hadapi. Proses ini juga menekankan partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari identifikasi hingga pelaksanaan serta pengawasan kegiatan. Pada akhirnya, pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

2.1.2 Pendapatan

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan

Menurut Tohar (dalam Polandos et al., 2019, hlm.3) mengatakan bahwasanya suatu pendapatan merupakan sebagai jumlah ataupun total penghasilan yang diterima baik dalam bentuk uang ataupun lainnya yang bernilai dari hasil jasa ataupun dari hasil suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang maupun kelompok. Sejalan dengan menurut Sholihin (dalam Ramadhan et al., 2023, hlm.1) pendapatan merupakan keseluruhan total penerimaan baik berupa tunai maupun non tunai yang merupakan hasil dari penjualan hasil barang dan suatau jasa dalam kurun waktu tertentu. Adapun menurut Giang (dalam Ramadhan et al., 2023, hlm. 2) menyatakan bahwa pendapatan merupakan sejumlah uang yang diperoleh individu maupun anggota keluarga dengan usaha kerja yang telah dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya pendapatan merupakan suatu perolehan yang didapat oleh individu, maupun kelompok dapat berupa sejumlah uang maupun nilai materi lainnya. Suatu pendapatan diperoleh dari suatu aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan sebagai berikut; (1) Modal, dimana dalam pada hal ini merupakan sejumlah nilai yang dikerluarkan untuk memulai sebuah usaha. (2) Tenaga kerja, dilihat dari keterampilan dan pengetahuannya dalam usaha. (3) Lama usaha Djoko (2022, hlm. 3). Adapun menurut Danang (2017) dalam (Fadhillah et al., 2023, hlm. 6) terkait dengan pendapatan dapat ditinjau dengan beberapa indicator berikut, diantaranya ; (1) *Omset/* penghasilan, ini merupakan suatu total pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha dalam suatu kurun waktu tertentu. (2) Laba usaha, merupakan suatu

keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha/ keuntungan bersih, artinya setelah dikurangi biaya produksi, biaya operasional, pajak, dan lain sebagainya dalam kegiatan usaha.

2.1.2.2. Sumber dan Bentuk Pendapatan

Pendapatan dapat bersumber/ berasal darimana saja, berikut merupakan sumber pendapatan menurut Case dan Fair (dalam Hanum, 2018, hlm. 3), Pertama, pendapatan dapat berasal dari upah atau gaji yang diterima sebagai kompensasi atas tenaga kerja. Kedua, pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan aset seperti modal, tanah, dan lain-lainnya. Ketiga, pendapatan juga dapat bersumber dari bantuan pemerintah. Adapun menurut (Ramadhan et al., 2023, hlm. 8) menyatakan bahwa terdapat 3 sumber pendapatan, pertama pendapatan dari sektor formal, dimana pendapatan berupa gaji dan upah diterima secara tetap dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada hal ini mencakup pekerjaan yang terikat. Kedua, pendapatan dari sektor informal, dimana pendapatan ini berasal dari penghasilan tambahan maupun usahan, sehingga pendapatan cenderung tidak tetap, seperti tukang, buruh, dan juga perdagangan. Ketiga, pendapatan di sektor subsistem, pendapatan ini diperoleh dari hasil usaha sendiri, seperti Bertani, ternak dan juga bantuan dari orang lain.

Adapun mengenai bentuk pendapatan menurut Fitriyah (dalam Ramadhan et al., 2023, hlm. 2) terbagi menjadi dua, yaitu pertama pendapatan berupa uang, merupakan seluruh penghasilan yang diterima secara teratur, biasanya sebagai imbalan atas jasa. Sumbernya antara lain gaji, upah, pendapatan bersih dari usaha, serta hasil dari penjualan, sewa, jaminan sosial, dan klaim asuransi. Kedua, pendapatan dalam bentuk barang, merupakan suatu penghasilan yang diterima secara teratur namun tidak dalam bentuk imbalan jasa, melainkan dalam wujud barang.

2.1.2.3 Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan berpera sebagai indikator utama yang penting untuk menilai kesejahteraan rumah tangga. Pada dasarnya, pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber pendapatan. Tingkat pendapatan ini berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan dasar rumah tangga. Jika pendapatan rendah, anggota rumah tangga perlu bekerja lebih keras atau mencari cara lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikut merupakan tingkat pendapatan menurut BPS (dalam Rakasiwi & Kautsar, 2021, hlm. 5) , pendapatan terbagi menjadi (4) empat kelompok / golongan, pertama, pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata di atas Rp 3.500.000 per bulan, pendapatan tinggi dengan rata-rata antara Rp 2.500.000 hingga Rp 3.500.000 per bulan, pendapatan sedang dengan rata-rata antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.500.000 per bulan, dan pendapatan rendah dengan rata-rata di bawah Rp 1.500.000 per bulan.

2.1.3 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 menyatakan bahwa “Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan suatu program kelompok dengan fokus sasarannya untuk keluarga miskin yang sudah tervalidasi dalam data terpatu kesejahteraan sosial (DTKS) yang pada programnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tiap kelompoknya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan” (Menteri Sosial RI, 2019).

2.1.3.1. Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pada Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki berbagai tujuan yang sudah tertera dalam peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 4 tahun 2019 (Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2019) sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pendapatan anggota.
- b. sebagai upaya terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar keluarga miskin (fakir miskin) anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- c. Meningkatkan kemampuan para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) seperti merencanakan, melaksanakan hingga evaluasi kegiatan usaha dari tiap kelompoknya.
- d. Membantu mewujudkan kemandirian suatu usaha baik itu sosial maupun ekonomi ada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

- e. Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial masyarakat miskin dan masyarakat dalam penanganan sosial-ekonomi.
- f. Untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengenali dan menemukan masalah, potensi anggota, hingga sumber daya sosial-ekonomi yang ada dilingkungan sekitar anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- g. Untuk meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mempertanggungjawabkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

2.1.3.2. Jenis Usaha Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdapat beberapa kriteria jenis usaha yang harus diperhatikan dan sudah tertera dalam peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 4 tahun 2019 (Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2019), sebagai berikut;

- a. Memperhatikan kesesuaian dengan potensi, kemampuan, dan keterampilan dari anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- b. Memperhatikan kesesuaian dengan potensi dan kondisi geografis dan sumber daya yang ada pada wilayah masing-masing.
- c. Dapat berupa usaha jasa maupun produksi.
- d. Sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
- e. Mudah dipasarkan.

Dengan demikian, seiring dengan adanya suatu perkembangan usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengelolaannya dapat diserahkan kepada individu maupun kelompok kecil yang memiliki kompetensi dan juga keahlian yang sesuai dengan karakteristik pada usaha yang sedang dijalankan tersebut. Meskipun demikian, pada pembinaan dan manajemen tetap berada dibawah naungan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sebagai upaya memperluas cakupan usahanya, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki opsi untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha atau berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang sesuai.

2.1.3.3. Tipologi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdapat beberapa pengelompokan tipe kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Tipe Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditentukan berdasarkan hasil dari evaluasi dengan minimal 1 (satu) tahun Usaha Ekonomi Profuktif (UEP) tersebut berjalan. Berikut merupakan tipe pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah tertera dalam peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 4 tahun 2019 (Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2019);

a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Maju

Pada tipe maju ini, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditandai dengan dilihat dari 3 (tiga) indikator;

1. Kelembagaan

Pada stuktur dan rencana kelompok berfungsi secara optimal dan administrasi yang lengkap.

2. Sosial

Antar anggota memiliki hubungan yang sangat erat, dana untuk iuran bermanfaat dan dapat di proses dengan baik, aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

3. Ekonomi

Berlipatnya modal, administrasi keuangan sangat tertib, sumber daya optimal, terdapat kemitraan yang luas, memiliki cabang ataupun asset usaha yang baru dan pendapatan meningkat signifikan.

b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang

1. Kelembagaan

Ditandai dengan mulai berfungsinya struktur dan rencana, kemudian administrasi mulai terisi.

2. Sosial

Antar anggota memiliki hubungan erat, terjadwalnya kerja kelompok, mulai ada dana iuran.

3. Ekonomi

Berkembangnya modal, mulai dimanfaatkan sumber daya, sudah ada kemitraan tingkat desa dan keterampilan anggota meningkat.

c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tumbuh

1. Kelembagaan

Ditandai dengan adanya rencana dan struktur dasar, tetapi belum sepenuhnya berfungsi.

2. Sosial

Interaksi antar anggota mulai ada dan terlihat kepedulian sosial, belum ada iuran.

3. Ekonomi

Adanya modal awal, potensi sumber daya, keterampilan dasar dan jejaring awal.

d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gagal

1. Kelembagaan

Ditandai dengan adanya struktur dan rencana tetapi tidak berfungsi atau dilaksanakan, kemudian tidak lengkapnya administrasi.

2. Sosial

Antar anggota tidak ada interaksi, kerja kelompok dan dana kesetiakawanan.

3. Ekonomi

Habisnya modal, tidak dimanfaatkannya sumber daya, tidak terdapat mitra, keterampilan, asset maupun pendapatan.

Dengan demikian, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdapat 4 (empat) kategori yaitu, maju, berkembang, tumbuh dan gagal, dengan indikator pada aspek kelembagaan, sosial dan ekonomi. Perkembangan ini secara umum ditandai dengan penguatan struktur, peningkatan interaksi sosial antar anggota dan kemajuan ekonomi dari modal awal hingga berlipat. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berhasil tidak hanya mampu meningkatkan taraf hidup anggotanya, tetapi juga keluarnya mereka dari data terpadu penanganan fakir miskin (DTKS) dan juga berkontribusi secara positif pada masyarakat sekitar. Dalam hal ini, mencerminkan

keberhasilan program sebagai upaya untuk menciptakan kelompok usaha yang mandiri, produktif dan sejahtera.

2.1.3.4. Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Departemen Sosial (DEPSOS) dalam (Nandini et al., 2022, hlm. 3) pendamping merupakan sebuah proses menjalin hubungan antara pendamping, penerima Bantuan Sosial, dengan masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah, memperkuat dukungan, serta memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitarnya. Pendamping dalam pemberdayaan berperan sebagai penghubung antara keluarga penerima manfaat untuk membantu mereka memanfaatkan Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pendamping diharapkan dapat menggali serta mengelola berbagai potensi dan sumber daya yang ada untuk digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan menurut departemen sosial (DEPSOS), pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan berperan sebagai kunci keberhasilan dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) itu sendiri sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin. Maka dalam hal ini, pendamping pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diharapkan memiliki keterampilan, kemampuan, jiwa profesional, dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan pendampingan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2019).

a. Prinsip Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dalam hal ini, ada beberapa prinsip Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang senantiasa harus diterapkan sebagai berikut;

1. Inisiatif Lokal
2. Dalam hal ini, seluruh proses pendampingan sosial sepenuhnya didasarkan atas ide dan keinginan dari dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sendiri, tidak dan bukan dari pihak luar.
3. Pendayagunaan Potensi Lokal
4. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan sekitarnya sebagai upaya untuk mendorong peningkatan motivasi, keterampilan serta peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

5. Partisipasi

Keterlibatan setiap individu yang memiliki tujuan sama untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan keluarga yang kurang mampu, termasuk anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan kegiatan.

6. Peningkatan Peran Aktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Keterlibatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) harus sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih luas lagi.

7. Bekerja bersama Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus mampu beradaptasi serta bekerjasama secara langsung dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

8. Kemitraan

Pentingnya untuk menjalin berbagai bentuk kejasama dalam setiap kegiatan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

9. Pendelegasian Kewenangan Berorganisasi

Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus mampu memberikan hak yang lebih luas kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengidentifikasi masalah, berbagai kebutuhan, sumber daya, hingga mencari solusi terbaik untuk kelompok.

10. Tidak Menggurui

Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE), harus menghindari pendekatan yang terlalu mengarahkan/ menggurui dan harus lebih menekankan pada diskusi dengan pihak terlibat terutama anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

11. Penggunaan Bahasa Lokal

Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus dibiasakan untuk menggunakan bahasa sehari-hari dalam melaksanakan pendampingannya agar memudahkan proses komunikasi.

12. Aktualiasi Budaya Lokal

Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus mampu menghidupkan kembali dan mengembangkan budaya local yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

b. Tugas Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Adapun tugas pendamping sosial pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai berikut;

1. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Melakukan verifikasi pada calon penerima bantuan.
3. Mempersiapkan calon penerima bantuan yang terpilih.
4. Menyusun rencana anggaran biaya kelompok.
5. Memberikan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
6. Memberikan pendampingan motivasi sosial kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
7. Mendampingi pada pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
8. Memonitoring jalannya kegiatan
9. Membantu pada proses penyusunan laporan hasil kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

a. Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasmi & Maani (2019) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan” memiliki hasil yang menunjukkan bahwsanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut sudah terdapat peningkatan untuk pendapatan anggotanya, hanya saja belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Peneliti dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa telah terjadi berbagai kendala terkait dengan akses pemasaran untuk area pasar yang lebih luas.

b. Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Martunis et al., (2023) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan studi pada Masyarakat Gampong Mee Peuduek, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya” memiliki hasil yang menunjukkan bahwa, tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa kelompok gagal karena menganggap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai program yang hanya menyediakan bantuan finansial, bukan keterampilan, sehingga kurang termotivasi. Sebaliknya, peserta yang memandang program ini sebagai kesempatan berharga mampu memanfaatkan keterampilan dan peralatan yang diberikan untuk membuka usaha menjahit dan meningkatkan pendapatan mereka dari Rp 200.000-350.000 menjadi Rp 1.000.000-5.000.000 per bulan.

c. Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningsih & Alexander Mujiburrohmah (2024), dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023” Studi kasus di Desa Tawangsari Kecamatan Garum, memiliki hasil yang menunjukkan bahwa, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah memberikan kontribusi dalam menambah penghasilan, namun belum bisa untuk diandalkan sebagai sumber utama pendapatan. Karena usaha ini masih berskala kecil serta keuntungan yang diperoleh relatif tipis, hasilnya harus dibagi rata di antara anggota kelompok juga. Pada saat ini, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Tawangsari lebih berfungsi sebagai usaha sampingan, bukan pekerjaan utama. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), perlu dipikirkan pendekatan lain, seperti mencari pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan sektor bisnis atau memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

d. Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Auliyazahra & Mulyono, (2024), dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Produksi Batik Pring Sedapur di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mukti Rahayu Kabupaten Magetan, memiliki hasil yang menunjukkan bahwa, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam aspek perekonomian telah berhasil dalam meningkatkan pendapatan anggotanya melalui penjualan batik, yang kemudian dibagi secara merata dengan anggota. Meskipun pendapatan tidak stabil karena bergantung pada jumlah pesanan, anggota sudah

dapat berkontribusi pada ekonomi keluarga. Penghasilan dari produksi batik berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan, dengan variasi sesuai jumlah pesanan. Selain daripada itu, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mukti Rahayu sudah berhasil membeli lahan untuk produksi tanpa harus menyewa lagi, dan pendapatan juga digunakan untuk keperluan pemasaran seperti pembelian rak dan manekin.

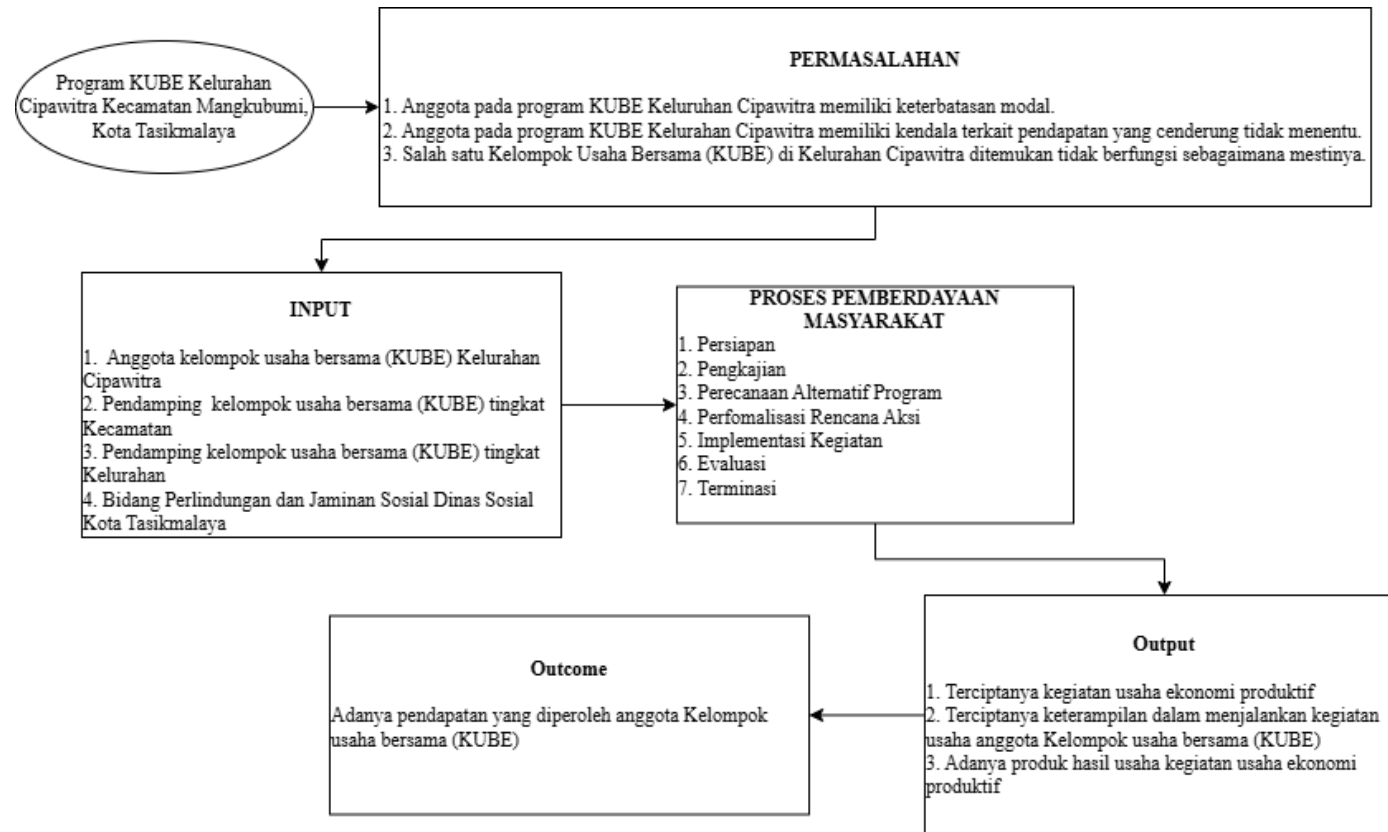
e. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2021) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga” memiliki hasil yang menunjukkan bahwasanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berda di Desa Donomulyo Nanggulan Kulon Progo dalam hal pendapatan sudah ada hasil yang baik, hanya saja dalam kesejahteraan sosial belum dapat dikatakan optimal.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2020, hlm. 60) menuturkan bahwa kerangka pemikiran / konseptula merupakan suatu bentuk dari konsep mengenai teori yang saling terkait dan berkaitan dari berbagai macam faktor yang diidentifikasi dari suatu masalah yang dianggap penting. Dengan demikian, kerangka konseptual dapat dikatakan sebagai suatu penghubung antara konsep dengan teori atau konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti oleh peneliti, kemudian memiliki tujuan agar mampu menghubungkan serta menjelaskan secara sistematis mengenai suatu topik yang akan peneliti bahas pada penelitian yang dilakukan.

Dalam konsep penelitian yang akan dilakukan ini, berasal dari masalah anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Cipawitra terkait dengan dihadapinya beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Masalah yang teridentifikasi adalah keterbatasan modal. Sehingga dari keterbatasan tersebut berdampak kepada kelangsungan usaha mereka yang mengakibatkan proses produksi menjadi terbatas dan proses pemasaran tidak luas dan pendapatan cenderung tidak menentu. Kemudian, salah satu kelompok usaha di Kelurahan Cipawitra tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan harus dianalisis dengan beberapa tahapan untuk mengetahui prosesnya, mulai dari persiapan, pengkajian, perencanaan alternative program performalisasi rencana aksi, implementasi, evaluasi hingga terminasi. *Outcome* yang diharapkan yaitu dapat mengetahui bagaimana hasil dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan suatu persoalan yang harus dijawab dan dipertanggungjawabkan pada suatu penelitian. Dengan demikian, jawaban penelitian dapat memudahkan dalam memecahkan persoalan/ masalah dari penelitian yang sedang diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah diatas, agar dapat memudahkan pengumpulan data dan informasi mengenai aspek yang akan diteliti dan akan menjadi focus penelitian ini. Sehingga, pertanyaan peneliti terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya?
- b. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan pendapatan?